

ABSTRAK

Faiqotul Ilmiyah. 2014, SKRIPSI. Judul: “Dampak Perlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Pada UMKM Industri Songkok di Gresik”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M. Si

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Pajak Penghasilan

Dalam mencapai pembangunan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, pemerintah membutuhkan pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu memberlakukan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto setiap bulan dengan tarif PPh final 1%. Munculnya peraturan tersebut adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, namun berlakunya peraturan tersebut dipertengahan tahun memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam penyeteroran serta pelaporan pajak untuk tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perlakuan PP 46 tahun 2013 atas pajak penghasilan pada UMKM industri songkok di Gresik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran dengan mudah mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata tentang fokus penelitian pada dampak berlakunya PP 46 tahun 2013. Adapun obyek penelitian ada 3 UMKM Industri songkok di Gresik. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diberlakukannya PP46 tahun 2013 tidak hanya menimbulkan kesulitan dari segi perhitungan dan penyeteroran saja karena efektif dipertengahan tahun, melainkan masih ada yang belum mengetahui peraturan pemerintah tersebut baik dari segi telah diberlakukannya peraturan tersebut maupun dari segi mekanisme perhitungannya. Adapun dampak lain dari berlakunya peraturan pemerintah tersebut yaitu besarnya pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto.